

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Komisioner	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
N e r a c a	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4 - 14

**SURAT PERNYATAAN KOMISIONER
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rhoma Irama
Alamat Kantor : Jl. Iskandarsyah I No. 3A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Alamat domisili sesuai
KTP atau kartu identitas lain : Jl. Pondok Jaya VI/14 RT.006 RW.006 Kel. Pela Mampang,
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Nomor telepon : 021 7258353
Jabatan : Komisioner LMKN Pencipta

Nama : Drs. Muhammad Samsudin Dajat Hardjakusumah
Alamat Kantor : Jl. Iskandarsyah I No. 3A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Alamat domisili sesuai
KTP atau kartu identitas lain : Jl. Parasitologi No.15 Cigadung, Cibeunying Kaler Bandung
Nomor telepon : 021 7258353
Jabatan : Komisioner LMKN Hak Terkait

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku di Indonesia.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar,
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material,
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, 24 April 2018
LMKN Pencipta

Rhoma Irama

LMKN Hak Terkait

Drs. Muhammad Samsudin Dajat Hardjakusumah

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Jl. Iskandarsyah I No. 3A | Kebayoran Baru | Jakarta Selatan 12160 | Indonesia

T: +6221 7258353 | F: +6221 7258341





Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Registered Public Accounting Firm

License No. 1016/KM.1/2016

Laporan Auditor Independen

No: DG18171086

**Komisioner Pencipta dan Komisioner Hak Terkait
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, laporan Aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Registered Public Accounting Firm

License No. 1016/KM.1/2016

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional** tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia.

Putang lain-lain

Jumlah aset lancar

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

JUMLAH ASET

LIABILITAS

Liabilitas

Asep Rahmansyah., SE., M.Si.Ak., CA., CPA

No. Reg. Akuntan Publik AP.0356

Jakarta, 24 April 2018

Jumlah liabilitas jangka pendek

Aset bersih

Tidak terkait temporer

JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

NERACA

31 Desember 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2016
A S E T		
Aset lancar		
Kas dan setara kas	2c, 4	2.892.518.239
Piutang royalti	2d, 5	3.724.012.850
Piutang lain-lain	6	528.160.749
Jumlah aset lancar		7.144.691.838
JUMLAH ASET		7.144.691.838
LIABILITAS DAN ASET BERSIH		
Liabilitas		
Liabilitas jangka pendek		
Kewajiban kepada pemilik hak	2g, 7	4.899.804.000
Utang lain-lain	8	3.007.140.894
Beban akrual	2h, 9	552.500.000
Utang pajak	2i, 3, 10	79.749.700
Jumlah liabilitas jangka pendek		8.539.194.594
Aset bersih		
Tidak terikat temporer	2h, 11	(1.394.502.757)
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH		7.144.691.838

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
LAPORAN AKTIVITAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2 0 1 6</u>
PENERIMAAN DAN PENDAPATAN	2h, 12	265.422.500
BEBAN OPERASIONAL	2h, 13	<u>1.414.537.315</u>
RUGI USAHA		<u>(1.149.114.815)</u>
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2h, 14	<u>(245.387.942)</u>
PENURUNAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT		<u>(1.394.502.757)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
 bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	2 0 1 6
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan royalti	3.920.193.796
Pembayaran kepada pemilik hak dan pihak ketiga	(1.022.907.315)
Pembayaran kepada pengurus	(100.000.000)
Penerimaan jasa giro	15.482.058
Pembayaran pajak	79.749.700
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	2.892.518.239
Arus kas dari aktivitas investasi	-
Arus kas dari aktivitas pendanaan	-
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	2.892.518.239
Saldo kas dan setara kas awal tahun	-
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	2.892.518.239

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Catatan Atas Laporan Keuangan

31 Desember 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah sebuah Lembaga Negara Bantu Eksekutif Non APBN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014, untuk mewakili pemilik lisensi atas hak cipta dan atau produk hak terkait, dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial, kepada pemilik lisensi tersebut. Atas kegiatan tersebut LMKN mendapatkan imbalan berupa jasa manajemen.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang efektif berlaku sejak 16 Oktober 2014, mengatur tentang pemberian lisensi atas Hak Cipta dan atau Produk Hak Terkait kepada pengguna yang bersifat komersial dan pemberian royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi satu ciptaan atau produk hak terkait tersebut.

Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan komersial.

Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Produser Fonogram dan Performer untuk kepentingan komersil.

Petunjuk teknis pelaksanaan proses pengelolaan royalti oleh LMKN diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti lagu dan musik dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian royalti rumah bernyanyi.

LMKN berkedudukan di Jl. Iskandarsyah I No 3A , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

b. Susunan Komisioner

Berdasarkan Akta No 03 tanggal 3 Juli 2016, yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu, SH, Notaris di Bekasi, susunan Komisioner LMKN adalah sebagai berikut :

Komisioner LMKN Pencipta :

H. Rhoma Irama

James Freddy Sundah

Adi Adrian

Dr. Imam Haryanto, Drs., SH., MH

Slamet Adriyadie

Komisioner LMKN Hak Terkait :

Rd. M. Samsudin Dajat Hardjakusumah

Ebiet G. Ade

Djanuar Ishak

Miranda Risang Ayu, S.H., L.LM, P.hD

Handi Santoso

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

Kebijakan akuntansi dan pelaporan LMKN sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia. Prinsip akuntansi signifikan yang diterapkan secara konsisten di dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Pernyataan Kepatuhan

Komisioner bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK).

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dasar pengukuran dalam penyajian laporan keuangan adalah biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam akun terkait. Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disajikan dengan menggunakan dasar akuntansi akrual.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, deposito berjangka yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tidak dimasukkan sebagai setara kas. Kas terdiri atas kas tunai dan kas di bank.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan adalah Indonesia Rupiah (IDR). Jika tidak dinyatakan lain, semua angka yang disajikan dalam laporan keuangan adalah Rupiah penuh.

c. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

d. Piutang Royalti

Piutang royalti disajikan sebesar jumlah neto royalti yang ditagihkan kepada pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait.

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian jangka panjang biaya dibayar di muka disajikan sebagai aset tidak lancar.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

f. Aset Bersih Terikat Temporer

Laporan Posisi Keuangan menyajikan masing masing kelompok aset bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembatasan permanen terhadap (1) aset, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (*endowment*).

Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.

Aset bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Kewajiban Kepada Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait

Disajikan sebesar royalti siap distribusi (*distibutbale royalty*) kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan manajemen diakui sebesar 5% dari nilai tagihan ke pemakai hak, pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga bank yang berlaku sedangkan pendapatan lainnya diakui atas dasar akrual.

Beban diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*). Beban ditangguhkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Beban bunga diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga yang berlaku.

i. Perpajakan

LMKN mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, LMKN harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Pada tahun 2016 Asosiasi belum mengakui adanya pajak tangguhan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

j. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 "Ketenagakerjaan" tanggal 25 Maret 2003, diluar program Pensiun Manfaat Pasti, LMKN berkewajiban memberikan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi kepada karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK tersebut meliputi berhenti karena memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri secara terhormat. Besarnya kompensasi PHK ditentukan oleh sebab terjadinya PHK, jumlah masa kerja dan besarnya penghasilan tetap yang diterima karyawan pada bulan terakhir. Pada tahun 2016 LMKN belum membukukan kewajiban imbalan pasca kerja karena belum memiliki karyawan tetap.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP mewajibkan LMKN untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Estimasi dan asumsi

LMKN mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali LMKN. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan terhadap adanya penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan berikutnya, diungkapkan di bawah ini.

Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan beban yang dapat dikurangkan dalam mengestimasi provisi pajak penghasilan LMKN. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan LMKN melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang pajaknya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") atau Auditor Pemerintah. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi dari posisi pajak LMKN dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
Catatan Atas Laporan Keuangan (Lanjutan)
31 Desember 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan (lanjutan)

Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang atau jasa, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, belanja modal dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

4. KAS DAN SETARA KAS

2016

Bank	
Rekening giro - Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Nomor rekening:	
102-00-1030300-3	1.421.232.259
102-00-1020005-0	925.159.087
102-00-1030068-6	219.507.195
102-00-1040023-9	119.367.302
102-00-1020065-4	104.193.640
102-00-1030000-9	54.516.051
102-00-1040032-0	20.344.401
102-00-1030090-0	8.310.000
102-00-1020036-5	7.542.245
102-00-1020056-3	6.451.075
102-00-1030009-0	5.894.984

Jumlah kas dan setara kas

2.892.518.239

Seluruh saldo bank milik LMKN ditempatkan pada bank BUMN dan tidak dibatasi penggunaannya.

5. PIUTANG ROYALTI

2016

PT Imperium Happy Puppy	226.450.200
PT Swara Indah Lestari	117.482.400
PT Lima Jaya Lestari	89.910.000
Henry Setiawan	77.322.600
PT Anugerah Karya Berlian	68.331.600
dipindahkan	579.496.800

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
Catatan Atas Laporan Keuangan (Lanjutan)
31 Desember 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG ROYALTI (Lanjutan)

	2 0 1 6
pindahan	579.496.800
PT Duta Nada Mas Prima	64.735.200
PT Swara Indah Makassar	62.937.000
PT Vandika Gemilang Jaya	62.337.600
Cahaya Makassar Entertainment	58.141.800
I Dewa Agung Gede Narayana	53.946.000
PT Kian Jaya Perkasa	52.147.800
PT Vizta Jaya	48.551.400
PT Diva Karaoke Sejahtera Pra	47.952.000
PT Arjuna Jaya Gemilang	46.753.200
Iwan Teddy	46.153.800
PT Mitra Senada	44.955.000
PT Suara Kreasi Nusantara	44.955.000
Bambang Hermanto	43.156.800
Jahja Agus Wijanto	43.156.800
PT Kresindo Pratama	43.156.800
PT Mitra Jaya Karaoke	39.560.400
PT Semarang Vizta	38.961.000
PT Borneo Musik Abadi	38.361.600
PT Kreasi Cipta Suara	35.964.000
PT Global Vizta Balikpapan	31.768.200
PT Vizta Nada Lampung	29.970.000
PT Arima Swararia	29.370.600
PT Mitra Agung	29.370.600
PT Vizta Nada Metro	29.370.600
Anton	28.771.200
PT Dieng Multi Entertainmen	28.771.200
Kenny Sukiman	26.973.000
PT Lestari Entertainment	26.973.000
PT Panca Senada	26.973.000
PT Adi Buana	25.774.200
PT Vizta Central Park	25.174.800
PT Elite Prima Utama	24.975.000
PT Manggala Gelora Perkasa	24.975.000
PT Sinar Galaxy	24.975.000
PT Mega Vista Suara Cemerlang	24.575.400
PT Suara Mas	24.575.400
PT Tiga Pendawa Jaya	23.976.000
dipindahkan	1.982.692.200

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
Catatan Atas Laporan Keuangan (Lanjutan)
31 Desember 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG ROYALTI (Lanjutan)

	2 0 1 6
pindahan	1.982.692.200
Iwa Kertiwa	23.976.000
PT Maritim Nusantara Persada	23.976.000
PT Swara Kallista Maju	23.976.000
PT Sahabat Lestari	22.777.200
PT Vizta Mandiri Benkoelen	22.777.200
Sigit Yuniarso	22.177.800
PT Galuh Vizta Suara Mas	21.578.400
PT Vizta Sinar Kartika	21.578.400
PT Vizta Nada Jambi	20.979.000
PT Transera Prospek Rekreasin	20.979.000
PT Vizta Melody Indah	20.379.600
PT Sembilan Mitra Abadi	19.780.200
PT Doa Restu Sejahtera	19.780.200
PT Inul Vista Karya	19.780.200
PT Vizta Nada Indah	19.780.200
PT Arima Gandaria Sejahtera	19.180.800
PT Pratama Sukses Gemilang	19.180.800
PT Yakin Sukses Sejahtera	19.180.800
Lain-lain (dibawah 19.000.000)	1.359.502.850
Jumlah piutang royalti	3.724.012.850

Merupakan saldo tagihan kepada pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	2 0 1 6
PPN atas royalti	501.115.400
Karyawan	1.800.000
Lain-lain	25.245.349
Jumlah piutang lain-lain	528.160.749

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
Catatan Atas Laporan Keuangan (Lanjutan)
31 Desember 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

7. KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG DAN PEMILIK HAK

	<u>2 0 1 6</u>
Sentra Lisensi Musik Indonesia	2.694.892.200
Anugrah Royalti Dangdut Indonesia	1.224.951.000
Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia	<u>979.960.800</u>
Jumlah kewajiban kepada pemilik hak	<u>4.899.804.000</u>

8. UTANG LAIN-LAIN

	<u>2 0 1 6</u>
Hak pencipta	2.531.607.258
Hak yang belum di tentukan (<i>Unclaim</i>)	460.831.571
Karyawan	<u>14.702.065</u>
Jumlah utang lain-lain	<u>3.007.140.894</u>

Hak yang belum ditentukan (*unclaim*) merupakan cadangan distribusi jika terdapat anggota dari LMK baru.

10. BEBAN AKRUAL

	<u>2 0 1 6</u>
Gaji	454.000.000
Jasa profesional	<u>98.500.000</u>
Jumlah beban akrual	<u>552.500.000</u>

9. UTANG PAJAK

	<u>2 0 1 6</u>
Pajak Penghasilan Pasal 23	4.696.500
Pajak Pertambahan Nilai	<u>75.053.200</u>
Jumlah utang pajak	<u>79.749.700</u>

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
Catatan Atas Laporan Keuangan (Lanjutan)
31 Desember 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

11. ASET BERSIH TIDAK TERIKAT

	<u>2 0 1 6</u>
Saldo awal tahun	-
Kenaikan (penurunan) aset bersih tidak terikat	<u>(1.394.502.757)</u>
Jumlah Aset Bersih	<u>(1.394.502.757)</u>

12. PENDAPATAN

	<u>2 0 1 6</u>
Pendapatan Manajemen:	
Hak Terkait	224.362.500
Hak Gabungan	22.410.000
Mall	11.000.000
Hotel	<u>7.650.000</u>
Jumlah pendapatan	<u>265.422.500</u>

13. BEBAN OPERASIONAL

	<u>2 0 1 6</u>
Biaya gaji dan tunjangan	1.298.700.000
Biaya konsultan	100.000.000
Biaya entertain dan jamuan	9.874.400
Biaya pajak	5.135.250
Biaya ATK	357.000
Biaya pos dan kurir	270.000
Biaya transport	<u>200.665</u>
Jumlah beban operasional	<u>1.414.537.315</u>

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
Catatan Atas Laporan Keuangan (Lanjutan)
31 Desember 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

14. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	<u>2 0 1 6</u>
Pendapatan jasa giro	15.482.058
Biaya meterai dan administrasi bank	(2.870.000)
Biaya Lainnya	<u>(258.000.000)</u>
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain bersih	<u>(245.387.942)</u>

15. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN

Pada tanggal 29 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-01.KI.01.08 TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan/Atau Musik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengangkat Pelaksana Tugas Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Nasional Hak Terkait yang terdiri dari:

Ketua	: James F Sundah
Wakil Ketua	: Danan Purnomo SH., Msi.
Sekretaris	: Dr. Dra. Erni Widyastari, Apt., MSi.
Anggota	: Dr. Imam Haryanto, Drs, SH., MH. Rapin Mudhiardjo , SH., ACCS. Ebiet G Ade Adi Adrian Raden Muhammad Samsudin Drajat Kusumah Yurod Saleh, SH., MH.

2. Mengangkat Pelaksana Tugas Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait bertugas dan berwenang sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
 - b. Melakukan penarikan royalti dari pengguna;
 - c. Melakukan pendistribusian royalti kepada LMK;
 - d. Meyelesaikan laporan Kinerja LMK dan audit laporan keuangan periode 2015 sampai dengan 2017;
 - e. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia periode bulan Januari 2018 sampai dengan terbentuknya komisioner yang baru.
3. Membentuk panitia seleksi LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait.
4. Pelaksana tugas Komisioner LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

15. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN (Lanjutan)

5. Segala biaya untuk dana operasional dalam melaksanakan tugas Pelaksana Tugas Komisioner LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dibebankan pada anggaran yang berasal dari royalti, dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbentuknya Komisioner LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait.

16. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan terlampir adalah tanggung jawab pengurus LMKN dan telah disetujui oleh Komisioner untuk diterbitkan tanggal 24 April 2018.